

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan, yang memiliki garis pantai yang panjang, oleh karena itu pelayaran merupakan sarana hubung antar pulau-pulau yang sangat penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, pemerintahan, pertahanan/keamanan, serta perkembangan kemajuan masyarakat di setiap wilayah tersebut. Sarana pelayaran meliputi bidang yang sangat luas, antara lain sebagai angkutan penumpang dan barang, penjagaan pantai, pariwisata, dan lain sebagainya. Kapal sebagai sarana pelayaran dalam sistem angkutan laut, memiliki peran penting dalam kaitannya dengan impor dan ekspor barang serta muatan dalam jumlah yang sangat besar dapat diangkut dengan kapal laut. Untuk mendukung sarana angkutan laut tersebut, diperlukan prasarana yang berupa pelabuhan, yang merupakan tempat pemberhentian (terminal) kapal setelah melakukan pelayaran. Di pelabuhan tersebut, sebagai tempat untuk melakukan kegiatan menaik-turunkan penumpang, bongkar-muat barang, pengisian bahan bakar dan air tawar, reparasi, pengadaan perbekalan, dan lain sebagainya.

Keberadaan Pelabuhan di suatu wilayah dapat memberikan peluang kerja untuk masyarakat sekitar, hal ini sesuai dengan konsep keterkaitan keruangan. Yaitu konsep yang menunjukkan keterkaitan suatu fenomena dengan fenomena lain di satu tempat atau ruang, baik yang menyangkut fenomena alam maupun sosial (Prof. Dr. Suharyono, 1994:35). Dalam hal ini,

keberadaan Pelabuhan, dapat memberikan peluang untuk masyarakat sekitar untuk bekerja sebagai buruh bongkar muat, berdagang, tukang ojek, atau *guide*.

Pelabuhan dalam pengertiannya adalah suatu tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya, dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan /barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan antar alat transportasi(Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 35 tahun 2007). Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa pelabuhan merupakan bandar yang dilengkapi dengan bangunan-bangunan untuk pelayanan bongkar-muat barang dan penumpang, karena sebuah kapal yang berlabuh juga berkepentingan untuk melakukan bongkar-muat barang dan menaik-turunkan penumpang.

Ditinjau dari keberadaan dan fungsi pelabuhan terdiri dari, pelabuhan penumpang dan barang. Pelabuhan penumpang yaitu pelabuhan yang mempunyai dermaga yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melayani segala kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan orang yang bepergian, seperti kantor imigrasi, keamanan, direksi pelabuhan, maskapai pelayaran dan sebagainya. Pelabuhan barang yaitu pelabuhan yang mempunyai dermaga yang dilengkapi dengan fasilitas untuk bongkar muat barang, dan daerah perairan pelabuhan harus cukup tenang ombaknya, sehingga memudahkan bongkar muat barang, dan oleh pemerintah bisa digunakan sebagai pelabuhan niaga.

Salah satu pelabuhan barang yang terdapat di Indonesia yaitu Pelabuhan Panjang. Pelabuhan Panjang terletak di Teluk Lampung di bagian Selatan Pulau Sumatera. Pelabuhan Panjang merupakan pelabuhan laut yang terbuka untuk Pelayaran Samudera dan Pelayaran dalam Negeri atau Pelayaran Nasional di Propinsi Lampung. Pelabuhan Panjang menjadi pintu gerbang untuk keluar masuknya barang dari dan ke luar Propinsi Lampung.

Sehubungan hal tersebut jenis barang yang diangkut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Alat-alat berat seperti beton (tiang pancang), mesin-mesin, besi, tiang listrik, *spare part* dan sebagainya.
2. Barang-barang curah kering yang terdiri dari beras, sagu, gula putih, biji kelapa sawit coklat, dan sebagainya.
3. Barang-barang curah cair seperti *CPO*, Molasis, Minyak sawit, dan sebagainya. (*Improving Port Performance I*, 2000:18)

Untuk pelabuhan Panjang pihak pengelola menyediakan/mengusahakan tenaga kerja sebagai jasa pelayanan bongkar muat barang, untuk memindahkan barang dari/ke kapal, fasilitas yang telah disediakan di Pelabuhan Panjang seperti Fasilitas-fasilitas operasional penanganan muatan : *crane* dermaga, peralatan mekanisme (*forklift.*, *head truck*, *chassis*, *mobile crane* dll), gudang transit dan buruh. (*Improving Port Performance I*, 2000:18)

Berbagai hal tersebut termasuk dalam fasilitas operasional penanganan muatan, tak terkecuali para buruh bongkar muat yang sering disebut tenaga kerja bongkar muat. Semua tenaga kerja tersebut terdaftar dan melakukan pekerjaan bongkar muat yang ada di pelabuhan (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 35 tahun 2007).

Kegiatan bongkar muat dari/ke kapal, peranan buruh diantaranya adalah:

1. *lashing* atau *unlashing* yaitu mengikat atau memperkuat muatan atau sebaliknya melepaskan pengikat atau penguat muatan.
2. *Sweeping* yaitu mengumpulkan muatan-muatan yang tercecer di dermaga atau kapal.
3. *Restowage* menyusun kembali muatan dalam *palka*.
4. *Triming* yaitu meratakan muatan di dalam *palka*.
5. *cleaning* yaitu membersihkan kapal.

Sistem kerja para buruh dengan cara berkelompok, dan kelompok buruh ini disebut dengan gang (istilah para buruh menyebut kelompok). Satu gang terdiri dari 12 orang, dengan 1 orang mandor dan 11 orang sebagai anggota. Dalam satu gang buruh bisa berasal dari daerah mana saja. Untuk sistem pembayarannya, dengan berdasarkan pada upah borongan, yang dihitung berdasarkan *tonage*, upah ini bervariasi sesuai dengan jenis barang, upah untuk setiap jenis barang per ton berkisar antara Rp.5.000,00 – Rp.19.000,00 (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 35 tahun 2007) yang dibayar setelah kegiatan bongkar muat barang telah selesai dikerjakan oleh buruh tersebut.

Buruh bongkar muat tidak bekerja setiap hari, yaitu bekerja bila ada kapal datang dan mengadakan kegiatan bongkar muat barang. Oleh karena itu pendapatan para buruh setiap bulan tidaklah pasti, tergantung dari berapa banyak kapal yang datang untuk melakukan kegiatan bongkar muat. Semakin banyak kapal datang melakukan bongkar muat, pendapatan buruh akan banyak, namun bila kapal yang melakukan bongkar muat sedikit, pendapatan buruh akan sedikit.

Berdasarkan keberadaan peralatan sebagai fasilitas pelabuhan, peranan tenaga kerja manual manusia untuk bongkar muat tidak bisa diabaikan, untuk mendukung kinerja yang diperlukan pelabuhan. Atas dasar kebutuhan tenaga kerja bongkar muat dalam kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan, nampak bahwa keberadaan Pelabuhan Panjang telah membuka kesempatan bagi masyarakat yang tinggal dan berada disekitar Pelabuhan Panjang. Hal ini merupakan konsep keterkaitan keruangan, dimana dengan adanya pelabuhan panjang maka dapat memberi kesempatan untuk masyarakat sekitar Pelabuhan panjang untuk bekerja. Dapat dilihat pada data Jumlah Buruh Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Tahun 2011 berikut:

Tabel 1. Jumlah Buruh Bongkar Muat Kapal Di Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Tahun 2011

Nama Kampung	Jumlah
Sukalila	11
Pancur	46
Karang Anyar	58
Kp Baru I	2
Kp Baru II	83
Kp Baru III	15
Kebun Sayur	17
Kebun Jeruk	3
Selirit	21
Jumlah Total	256

Sumber: Hasil wawancara dengan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang Tahun 2011

Dari tabel di atas terdapat sebanyak 83 orang penduduk Kampung Baru II Kelurahan Panjang Utara bekerja sebagai buruh bongkar muat di Pelabuhan Panjang 57 orang penduduk berstatus

kepala keluarga dan 26 penduduk berstatus lajang. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah buruh bongkar muat yang berstatus kepala keluarga. Sebagai tenaga kerja kasar atau *unskill* dan termasuk dalam sektor informal, yaitu tenaga kerja yang hanya mengandalkan tenaga saja. Pada umumnya buruh bongkar muat memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan *skill* terbatas, sehingga tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Mengingat jenis pekerjaan sebagai buruh bongkar muat sangat tergantung dari kedatangan kapal maka pendapatan yang diperoleh tidak pasti, ketidakpastian ini akan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pokok keluarga buruh. Selain itu dengan jam kerja yang tidak pasti memungkinkan untuk buruh memiliki pekerjaan sampingan guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Pendapatan buruh yang tidak pasti juga akan membuat buruh menggunakan strategi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pendapatan buruh bongkar muat di Kampung Baru II Kelurahan Panjang Utara terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Umur, Tingkat Pendidikan, Jumlah Anak, Jam Kerja, dan Upah Sebagian Buruh Bongkar Muat Pelabuhan Panjang di Kampung Baru II Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Tahun 2011

No	Nama buruh bongkar muat	Umur	Tingkat Pendidikan	Jumlah anak	Jam kerja /minggu	Jmlah Tonage	Upah Rata-rata /Bulan
1.	Suhardi	42	SD	5	28	160	Rp. 900.000,00
2.	Warita	41	SD	2	24	160	Rp. 800.000,00
3.	Tamrin	36	SD	2	28	160	Rp. 900.000,00
4.	I s a k	39	SD	3	28	160	Rp. 900.000,00
5.	Usman	51	SD	5	44	176	Rp.1.300.000,00
6.	Mahpi	41	SD	3	44	176	Rp.1.200.000,00
7.	Tatang	29	SD	2	40	180	Rp. 950.000,00
8.	Abdulah	32	SD	3	32	180	Rp.1.000.000,00
	Jumlah	-	-	33	268	1352	Rp.7.950.000,00
	Rata-rata	-	-	3	34	169	Rp. 993.750,00

Sumber: Hasil wawancara dengan beberapa buruh bongkar muat di Kampung Baru II Kelurahan Panjang Utara.

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat dijelaskan bahwa pendapatan yang diterima oleh beberapa buruh bongkar muat di Kampung Baru II Kelurahan Panjang Utara bervariasi. Hal ini dari sistem kerja borongan bukan upah harian atau upah bulanan. Selain itu buruh yang ada di atas bukan berasal dari satu gang sehingga pendapatan satu dan lainnya tidak sama. Bertolak data tabel 2 tersebut rata-rata sementara pendapatan buruh bongkar muat yang berstatus sebagai Kepala Keluarga di Kampung Baru II Kelurahan Panjang Utara setiap bulannya sebesar Rp. 993.750.

Atas dasar uraian tersebut di atas, jumlah pendapatan yang diperoleh buruh bongkar muat yang berstatus Kepala Keluarga, memiliki pendapatan yang tidak pasti, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Studi Tentang Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pokok Minimum Keluarga Buruh Bongkar Muat Pelabuhan Panjang di Kampung Baru II Kelurahan Panjang Utara Tahun 2011.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka di dapat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Jam kerja buruh bongkar muat
2. Pendapatan buruh bongkar muat
3. Pekerjaan sampingan buruh bongkar muat
4. Jumlah tanggunganburuh bongkar muat
5. Pemenuhan kebutuhan pokok minimum keluargaburuh bongkar muat
6. Strategi pemenuhan kebutuhan pokok minimum keluargaburuh bongkar muat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Berapakah rata-rata jumlah jam kerjasetiap minggu para buruh bongkar muat Pelabuhan Panjang di kelurahan Panjang Utara tahun 2011?
2. Berapakah rata-rata pendapatan perbulansetiap buruh bongkar muat di Pelabuhan Panjang kelurahan Panjang Utara tahun 2011?
3. Apakah setiap buruh bongkar muat memiliki pekerjaan sampingan?
4. Berapakah jumlah tanggungan buruh bongkar muat di Pelabuhan Panjang di kelurahan Panjang Utara tahun 2011?
5. Bagaimanakah tingkat pemenuhan kebutuhan pokok minimum keluarga buruh bongkar muat di Pelabuhan Panjang di kelurahan Panjang Utara tahun 2011?
6. Bagaimanakah strategi pemenuhan kebutuhan pokok minimum keluarga buruh bongkar muat di Pelabuhan Panjang di kelurahan Panjang Utara tahun 2011?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan informasi rata-rata jumlah jam kerja setiap minggu buruh bongkar muat Pelabuhan Panjang di Kampung Baru II Kelurahan Panjang Utara Tahun 2011
2. Untuk mendapatkan informasi rata-rata jumlah pendapatan setiap buruh bongkar muat perbulan di Pelabuhan Panjang Kampung Baru II Kelurahan Panjang Utara Tahun 2011
3. Untuk mendapatkan informasi bagaimana pekerjaan sampingan buruh bongkar muat di Pelabuhan Panjang Kampung Baru II Kelurahan Panjang Utara Tahun 2011

4. Untuk mendapatkan informasi rata-rata jumlah tanggungan buruh bongkar muat Pelabuhan Panjang di Kampung Baru II Kelurahan Panjang Utara Tahun 2011
5. Untuk mendapatkan informasi tingkat pemenuhan kebutuhan pokok minimum keluarga buruh bongkar muat Pelabuhan Panjang di Kampung Baru II Kelurahan Panjang Utara Tahun 2011
6. Untuk mendapatkan informasi strategi pemenuhan kebutuhan pokok minimum keluarga buruh bongkar muat Pelabuhan Panjang di Kampung Baru II Kelurahan Panjang Utara Tahun 2011

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana (S-1) pada Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Sebagai aplikasi ilmu pengetahuan geografi yang diperoleh selama pendidikan di bangku kuliah dalam memecahkan masalah yang terdapat di lapangan.
3. Sebagai suplemen bahan ajar Geografi SMA Kelas X semester II pokok bahasan sumber daya manusia.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Ruang lingkup objek penelitian ini: studi tentang pemenuhan kebutuhan pokok minimum keluarga buruh bongkar muat Pelabuhan Panjang di kelurahan Panjang Utara
2. Ruang lingkup subyek penelitian ini: Kepala Keluarga buruh bongkar muat Pelabuhan Panjang di kelurahan Panjang Utara
3. Ruang lingkup tempat dan waktu penelitian: Kampung Baru II Kelurahan Panjang Utara tahun 2011
4. Ruang lingkup ilmu adalah Geografi Sosial

Geografi sosial adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara penduduk dengan keadaan alam serta aktivitas dan usaha manusia dalam menyesuaikan dan menguasai keadaan alam demi kemakmuran dan kesejahteraan hidupnya (R. Bintarto, 1998:17).

Alasan digunakannya Geografi sosial sebagai ruang lingkup dalam penelitian ini karena topik kajian dalam penelitian ini mempelajari masyarakat dan aktivitasnya, yaitu suatu keluarga dalam masyarakat yang beraktivitas dan melakukan usaha dengan memanfaatkan fasilitas yang berada di lingkungan tempat tinggalnya untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi dan mempertahankan kelangsungan hidupnya.

